Daftar Pustaka

1. Buku

Hajarti, Winarsi, Agus, Oemar. *Politik Hukum Pertanahan*. surabaya: AIRLANGGA University PRESS, 2020.

Kodoatie, Robert. *Tata Ruang Tanah Air Tanah*. Yogyakarta, 2021.

M.H. Jamas Yoseph Palenewn, S.H., "Hukum Agraria Dan Pendaftaran Tanah Di Indonesia," *Repository.Penerbitwidina.Com*, 2022, 28.

Ramadani, Rahmadhani. *Hukum Pertanahan*. Edited by syukran Lubis and Muhamad Yusrizal. Medan: UMSU pres, 2024.

Wisnu Agung Nugroho , Citranu Citranu , Mia Amalia , Ika Fitrianita , Elias Hence Thesia , Moh. Mujibur Rohman , Asti Dwiyanti, Erman Rahim , Hidayati Fitri, Opniel Harsana BP. *Sistem Hukum & Peradilan Di Indonesia : Teori Dan Praktik*. Edited by Mohamad Rohman. jambi: PT. Sonbedia Publishing Indonesia, 2024.

2. Jurnal

Afifah, Fatma, Fikri Hadi, and Farina Gandryani. "Konsep Hak Milik , Hak Guna Usaha , Hak Guna Bangunan Dan" 2, no. 2 (2024): 115–27.

Agraria, Peraturan Dasar Pokok-pokok, and A Latar Belakang. "Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Anaomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," 1997.

Andrew, Andrew Stefano. "Pemanfaatan Drone Dalam Pemetaan Kontur Tanah." *Buletin Loupe* 16, no. 02 (2020): 32–41.

Anggraeni, Dewi, Dhody Ar Widjajaatmadja, and Zulkarnein Koto. "Kepastian Hukum Penerbitan Sertifikat Ganda Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Oleh Kantor Pertanahan Volume 2 Nomor 8 Agustus 2023." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2 (2023): 2017–31.

Ardani, Mira Novana. "Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha Guna Mencegah Tanah Menjadi Terlantar." *Gema Keadilan* 8, no. 1 (2021): 63–79. https://doi.org/10.14710/gk.2021.11395

———. “Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas Dan Fungsi i Badan Pertanahan Nasional.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 476–92. https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.476-492.

Ardiansyah, Ardiansyah. “Izin Membuka Tanah Negara Solusi Penyelesaian Permasalahan Kasus Pertanahan.” *Journal de Facto* 10, no. 1 (2023): 31–44. https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v10i1.153.

Astary, Komang T.B., Dantes, Komang F., I gusti, A.A.H. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Sewa Dakam Kepemilikan Atas Objek Sewa Tanah Yang Berada Dalam Eksekusi Hak Tanggungan Menurut Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 6 Nomor 2, no. September (2022): 32–41.

Aziziyah, Alvina Nur, and Mas Anienda Tien Fitriyah. “Tumpang Tindih Sertifikat Tanah.” *Legal Spirit* 7, no. 2 (2023). https://doi.org/10.31328/ls.v7i2.4807.

Batubara, S.A., Tanwin, M.S., Yosephine, F.A. “Penyelesaian Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Yang Terhutang Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematika Lengkap (PTSL).” *Diversi Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2021): 129–50.https://ejournal.uniska.kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473.

Belakang, A Latar. “Sertifikat Tanah Ganda Akibat Lemahnya Data Base Pertanahan.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 4, no. 2 (2014). https://doi.org/10.35968/jh.v4i2.97.

Budiman, Haris, and Muhammad Faldi Firdansyah. “Kewenangan Kantor Pertanahan Dalam Menyelesaikan Sengketa Overlapping Pada Bidang Tanah: Studi Di Kabupaten Kuningan.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2024). https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i2.14219.

Devina Herdiani, and Frency Siska. “Penerapan Asas Aman Dalam Proses Pendaftaran Tanah Untuk Mencegah Penerbitan Sertifikat Ganda.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 5, no. 1 (2025): 161–68. https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i1.15969.

Dewi, Nabilla Nastiti, and Herma Setiasih. “Nabila Nastiti Dewi, Herma Setiasih, ‘Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020’. Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol. 14 No. 1, 2024, Hlm 70-71.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2024).

Dyah Ochtorina Susanti, Fendi Setyawan, Ananto Setyo Utomo. “Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penerbitan Dan Pendayagunaan Tanah-Tanah Terlantar” 3, no. 1 (2023): 330–45.

Frans, Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Hajarti, Winarsi, Agus, Oemar. *Politik Hukum Pertanahan*. surabaya: AIRLANGGA University PRESS, 2020.

Hak, September. “Hak Atas Sertifikat ▪” 13 (2020): 642–54.

Hamidah, Upik. “Implikasi Diskresi Kepala Kantor Pertanahan Dalam Pendaftaran Tanah.” *Cepalo* 3, no. 2 (2019): 93.

Harianto, Asis, Resti Riancana, and Riniarty Djamal. “Pendaftaran Tanah Wakaf: Urgensi Dan Prosedurnya.” *Jurnal Yustisiabel* 9, no. 1 (2025): 52–67. https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v9i1.3928.

Hartarto, Mahendra Tri, Adonia Ivonne Laturette, and Jenny Kristiana Matuankotta. “Kedudukan Dan Peranan Kantor Pertanahan Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Diberlakukan Peraturan Menteri Agrari Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyeles” 3, no. 1 (2023): 64–71.

Hukum, Jurnal. “Penyelesaian Hukum Terkait Adanya Pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha Akibat Kesalahan Menetapkan Batas Tanah” 2, no. 2 (2023): 391–99.

Ilmanudin, Fauzan Fahmi. “Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Atas Kepemilikan Tanah.” *LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023).

Jade, Adinda Putri, Diah Nadia Putri, and Sholahuddin Al-Fatih. “Perizinan Membuka Tanah Negara Di Kota Balikpapan.” *Supremasi Hukum : Jurnal*

Penelitian Hukum 29, no. 2 (2023). https://doi.org/10.33369/jsh.29.2.102-130.

Jamas Yoseph Palenewn, S.H., M.H. "Hukum Agraria Dan Pendaftaran Tanah Di Indonesia." *Repository.Penerbitwidina.Com*, 2022, 28.

Jurnal, Jicn, Cendikiawan Nusantara, Salsabila Agustiyani Yusmantoro, Risang Satrio Hanurogo, Ainur Rofy, Sam Abdul, Aprila Niravita, et al. "Upaya Pencegahan Sengketa Pertanahan," no. November (2025): 9903–11.

Kasmiati et al. "Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Ssertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional" 32, no. 3 (2021).

Kep, Akreditasi, Dirjen Penguatan, Risbang Kemenristekdikti, Undang Nomor, Tahun Tentang, and Mata Uang. "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Penelitian Hukum* 19, no. 3 (2019): 339–48.

Khalimi, Gunawan Widjaja, and Cecep Suhardiman. "Analisis Pengaruh Sertifikasi Tanah Terhadap Peningkatan Nilai Ekonomi Tanah Melalui Kepastian Status Hukum: Kajian Literatur." *Borjuis: Journal of Economy* 2, no. 4 (2025): 178–87. https://sociohum.net/index.php/BORJUIS/article/view/232.

Kodoatie, Robert. *Tata Ruang Tanah Air Tanah*. Yogyakarta, 2021.

Kupang, Kota. "Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Kaitannya Dengan Pendaftaran Tanah (Studi Tentang Pendaftaran Tanah Ssitematika Lengkap Di Kota Kupang)" 1, no. November (2023): 49–58.

Kurniawan, Eri, Muhammad Azhar, and Hafiz Muhardi. "Aplikasi Layanan Pengukuran Bidang Tanah Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sekadau Berbasis Website Application of Land Measurement Services at The Website Based Office of The National Land Agency of Sekadau Regency" 01, no. 2 (2023): 35–41.

Laksono, Muhammad Agung. "Tinjauan Yuridis Proses Peralihan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021." *YURIJAYA:Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (2023): 39–54.

Manthovani, Reda, and Istiqomah Istiqomah. "Pendaftaran Tanah Di Indonesia." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2021): 23.

Muchsin, Tamrin, Sri Sudono Saliro, Sardjana Orba Manullang, and Marjan

Miharja. "*Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Hal Pendaftaran Tanah: Sebuah Tinjauan Kewenangan Dan Akibat Hukum*." *Madani Legal Review* 4, no. 1 (2020): 63–80.

Mujiburohman, Dian Aries. "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (Ptsl)." *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 4, no. 1 (2018).

Murni, C. S. (Christiana), and S. (Sumirahayu) Sulaiman. "Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah." *Lex Librum* 8, no. 2 (2022): 183–98. https://www.neliti.com/publications/557768/.

Nathasya, Hervina. "Kewenangan Kantor Pertanahan Kota Semarang Dalam Penyelesaian Perselisihan Terkait Sertifikat Ganda." *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 1 (2024): 70–80.

Danel Aditia Situngkir. "MENGENAL TEORI DEMOKRASI DAN TEORI KEWENANGAN DALAM ILMU HUKUM" 5, no. 4 (2023): 8–14.

Palenewen, James Yoseph, and Eddy Pelupessy. "Sosialisasi Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan , Hak Atas Tanah , Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah Pada Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura" 1, no. 18 (2025).

Pamungkas, Wahyu, and Anggun Fitrian Isnawati. "Surat Pencatatan Ciptaan." *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Surat*, 2023, 2. http://repository.uinsu.ac.id/5536/7/Sertifikat HAKI Yusuf Hadi dkk.pdf%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/5536/1/JURNAL Yusuf Hjy TADBIR VOL 5 NO 1 JANUARI-JUNI 2019.pdf.

Putra, Bayu Setiawan Hendri, and Arief Suryono. "Kedudukan Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Jaminan Kebendaan Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah." *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020): 57.

Rafie, M A, and W C Happier. "Sejarah Perkembangan Hukum Agraria Di Indonesia Sebelum Dibentuknya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria …." *Journal Sains …* 2, no. 5 (2024): 340–50.

Ramadani, Rahmadhani. *Hukum Pertanahan*. Edited by syukran Lubis and

Muhamad Yusrizal. Medan: UMSU pres, 2024.

Rasmawati, Irma, Adonia Ivonne Laturette, and Pieter Radjawane. "Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Kepada Umat Manusia . Sebagai Negara Agraris , Maka Tanah Mempunyai Arti Yang Sangat Masyarakat Yang Tertinggi , Secara Konstitusi Diatur Dalam Pasal 33 Ayat (3)." *Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 47–68.

Review, Court, Jurnal Penelitian, and Hukum Vol. "Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya Dalam Hukum Agraria Yang Di Dasari Undang-Undang Pokok Agraria" 3, no. 1 (2023): 28–34.

Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. "Kepastian Hukum Pemegang Sertipikat Hak Pakai Atas Tanah Negara Terhadap Pemegang Surat Keterangan Ganti Rugi Dalam Gugatan Perdata" 2 (2024): 306–12.

Rumah, Industri, Tangga Spp-irt Di, and Dinas Kesehatan. "Implementasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan" 1, no. 1 (2025): 67–73.

Salim, Agus. "Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Penerbitan Sertifikat Ganda Completion of Legal Disputes Against Holders of Certificate of Rights Certificate With Double." *Jurnal Usm Law Review* 2, no. 2 (2019).

Sandika, Fajri Lio, Tofik Yanuar Chandra, Erny Kencanawati, Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, Dalam Penyelesaian, Sengketa Tumpang, and Tindih Pertanahan. "Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Pertanahan Melalui Mediasi" 1, no. 3 (2023).

Saranani, Abdul Mutalib, Dosen Universitas, Lakidende Unaaha, and Penyelesaian Sengketa. "Tinjauan Hukum Tentang Pembuktian Sertifikat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah" 1, no. 3 (n.d.).

Satrio Abdillah, Saiful Anwar Reza, Mardayan Arifandi, and Reflyna Karnesih. "Penyuluhan Hukum Perubahan Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik." *Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2025): 116–26. https://doi.org/10.63424/marsialapari.v2i2.350.

Siti Kotijah Fatmawati. "Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muna Tahun 2014 - 2034." *Jurnal Majelis*, no. 09 (2019): 52.

Solossa, Marthinus, Johan Rongalaha, and James Yoseph Palenewen. "Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Asli Tapi Palsu Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 4 (2024): 100–109. https://doi.org/10.5281/zenodo.14173511.

Sulfian, A. Sultan. "Optimalisasi Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Agraria Melalui Jalur Mediasi." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 1 (2025): 151–61. https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i1.10329.

Syahputra, Mohammad Firdaus, Universitas Negeri Semarang, and Alvin Dwi Arianto. "Perbedaan Kebijakan Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Malaysia Dan Singapura: Efektivitas Dan Tantangannya." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 1 (2025): 348–61.

Undari Sulung, Mohamad Muspawi. "Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25." *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 2 (2024): 28–33.

Upavata, Candya, Kutey Karta, Prisca Dwi, Ni Wayan, and Widya Pratiwi. "Urgensi Sistem Pengamanan Pada Sertifikat Tanah Digital." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 9 (2021): 832–55.

Usaha, Guna, and D A N Hak. "Jurnal Widya Bhumi" 3, no. 2 (2023).

Wahyono, Eko Budi, Kusmiarto, and Arif Suhattanto. "Perluasan Kewenangan Surveyor Berlisensi Dalam Mendukung Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia," 2020, 344.

Wardoyo, Heru. "Syarat Sah Kepemilikan Hak Atas Tanah Dan Kewenangan Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Di Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 1 (2024): Hal.122. https://doi.org/10.56338/jks.v7i1.4714.

Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024).

Wisnu Agung Nugroho , Citranu Citranu , Mia Amalia , Ika Fitrianita , Elias Hence Thesia , Moh. Mujibur Rohman , Asti Dwiyanti, Erman Rahim , Hidayati Fitri, Opniel Harsana BP. *Sistem Hukum & Peradilan Di Indonesia : Teori Dan Praktik*. Edited by Mohamad Rohman. jambi: PT. Sonbedia Publishing Indonesia, 2024.

Yusrizal, Muhammad. "Kepentingan Umum." *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum* 2 (2021): 1–1.

Zamroni, Mohammad. "Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata," 2024, 495–518.

3. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) tentang Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 3 tentang tujuan pendaftaran tanah;

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak pengelolaan, Hak atas tanah, Satuan rumah susun, dan Pendaftaran tanah;

Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Pengukuran, pemetaan, dan penelitian data yuridis titik rawan tumpang tindih sertifikat;

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan